

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Satu diantaranya pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena mereka telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward dan punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Laporan keuangan juga merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi, oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Menyusun laporan keuangan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap kepala daerah, hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara sesuai mekanisme yang ada. Laporan keuangan merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah entitas. Terutama untuk pemerintah daerah, laporan keuangan akan menjadi salah satu bahan penilaian yang penting, karena entitas ini bekerja berdasarkan sebuah anggaran dan realisasi anggaran tersebut tercantum dalam laporan keuangan. Kita dapat menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk

menilai kinerja sebuah pemerintah daerah. Tentunya pengguna dari laporan keuangan ini bukan hanya orang-orang dari bidang akuntansi yang dapat memahami laporan keuangan. Tapi justru penggunanya adalah publik atau semua kalangan, karena uang negara yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah itu sebagian besar merupakan uang yang berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Oleh karenanya ada sebuah badan yang harus menilai laporan keuangan tersebut dan menginformasikannya kembali kepada publik akan hasil penilaiannya. Dalam hal ini adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bertindak sebagai penilai laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97 : Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi). Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan : Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (Syarif, 2016).

Kualitas laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarahkan pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Disamping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ismawanto, 2016).

Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari negara. Jika kita lihat kondisi saat ini, tata kelola keuangan pemerintah masih belum terlalu baik karena masih tingginya kebocoran pada keuangan negara sebagaimana yang diberitakan di berbagai media (Handayani, 2012).

Mengacu pada tingginya kebocoran pada keuangan Negara, maka laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (TP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Semester 1 Tahun 2014 pada kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menunjukkan adanya 125 kasus kelemahan SPI di pemerintah yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 175 kasus senilai Rp. 56,22 milyar (BPK, IHPS, Semester 1, 2014). Daftar jumlah kasus kelemahan SPI atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan LKPD semester 1 Tahun
2014
(Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung)

No	Nama Kabupaten/Kota	Total Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Internal
1	Prov. Lampung	16	6	8	2
2	Kab. Lampung Barat	5	3	2	0
3	Kab. Lampung Selatan	12	4	4	4
4	Kab. Lampung Tengah	5	2	3	0
5	Kab. Lampung Timur	11	4	5	2
6	Kab. Lampung Utara	8	2	3	3
7	Kab. Mesuji	8	4	1	3
8	Kab. Pesawaran	6	3	2	1
9	Kab. Pringsewu	9	4	3	2
10	Kab. Tanggamus	6	4	1	1
11	Kab. Tulang Bawang	9	4	4	1
12	Kab. Tulang Bawang Barat	10	4	3	3
13	Kab. Way Kanan	8	2	5	1
14	Kota Bandar Lampung	8	3	3	2
15	Kota Metro	4	1	2	1

Sumber: www.bpk.go.id

Implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual TA 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 pada Pemrov masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu penyusunan roadmap implementasi SAP berbasis akrual

tidak melibatkan semua kepala satuan kerja. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya. Kebijakan dan sistem akuntansi belum seluruhnya diimplementasikan, pemuktahiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi. Ambar juga menyebutkan SDM pengelola keuangan aset dan TI belum semua memiliki kompetensi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai. Selain itu, Bandar Lampung juga perlu mendapat perhatian yaitu belum mempunyai rencana/strategis dalam implementasi SAP berbasis akrual, para kepala satuan kerja belum mendapat pernyataan tertulis untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual. BPK juga menyorot sistem aplikasi yang dimiliki tidak terintegrasi vertikal dan horizontal (Ambar, 2015).

Fenomena yang terjadi saat ini, Unit Tindak Korupsi (Yipikor) Satreskrim Polresta Bandarlampung, tengah menyidik perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengujian sampel air di UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun anggaran 2015 dan 2016. Kasus ini terjadi di tahun 2015 dan 2016, saat itu UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, melakukan pengujian kualitas air seperti limbah cair dari beberapa perusahaan industri, rumah sakit serta perhotelan. Setiap melakukan uji sampel air, UPT menarik retribusi yang besarnya ditetapkan pemerintah daerah (Pemda). Mengenai besaran retribusi tersebut tergantung jumlah parameter yang akan diuji serta biaya pengambilan sampel air kepada perusahaan-perusahaan. Dalam pengelolaan retribusi tersebut, pihaknya menduga ada penyimpangan anggaran. Kemudian penyidik melakukan penyelidikan pengambilan sampel dari 25 perusahaan yang telah melakukan uji sampel air. Diketahui, jumlah anggaran yang telah disetorkan dari 25 perusahaan tersebut, sebesar Rp 753.905.000,-. Namun yang tercatat dalam laporan keuangan UPT, hanya sebesar Rp 408.717.00,-. Adanya perbedaan laporan pendapatan UPT dengan yang disetorkan 25 perusahaan. Sehingga disinyalir, adanya

penyelewengan dana dalam pengelolaan retribusi tersebut. Penyelewengan dana tersebut tidak disetorkan sebagai retribusi tersebut ke kas negara. Berdasarkan hitungan kasar penyidik, didapat jumlah kerugian negara hingga mencapai Rp 345.608.000,- (Poskotanews.com, 2017)

Berdasarkan fenomena tersebut maka diketahui bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh efektivitas penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014), yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin efektif penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah tersebut.

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan (Yuliani, 2010).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2015) yang berjudul pengaruh kompetensi SDM dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada objek penelitiannya dan adanya penambahan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, alasan penambahan variabel tersebut adalah merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Kuesioner diberikan kepada kepala dan staf sub bagian keuangan yang terpilih sebagai sampel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Masalah Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung.
4. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, dan juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan apa saja yang mempengaruhi dan berkaitan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi IBI Darmajaya.

1.5.2 Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan, bahan referensi, dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.5.3 Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam pertimbangan pengambilan keputusan tentang penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesa (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II. Penulis mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat/teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi rangkuman dari pembahasan yang terdiri dari jawaban atas perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis, hal baru yang ditemukan dan prospek temuan, dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang sekurang-kurangnya memberi saran obyek penelitian dan penelitian selanjutnya sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN